

PEKERJA INDUSTRI INDONESIA, GERAKAN BURUH, DAN NEW SOCIAL MOVEMENT: MERAJUT SEBUAH KEMUNGKINAN

Nicolaas Warouw¹

Abstract

The resignation of the Soeharto's regime in 1998 once built up the optimism towards the future of the labor movement in Indonesia. The new regime post Soeharto's finally has to adopt the ILO convention no.87 which admits the rights of labors to involve themselves in organizations, despite the government's political maneuver in order to create the impression of being reformist, and in order to interest international donation. Whatever the controversy is like, such a decision has become the principal breakthrough for the contemporary labor movement of Indonesia.

Bagi sebagian aktivis dan akademisi yang menaruh minat pada isu perburuhan dan perjuangan pekerja, terutama pekerja dari sektor industri manufaktur, kejatuhan rezim otoritarian Soeharto pada 1998 sempat membangkitkan optimisme terhadap masa depan gerakan buruh di Indonesia. Tradisi-tradisi radikal pada sekitar paruh pertama tahun 1990-an berupa aksi kolektif dan keterlibatan

buruh dalam organisasi-organisasi perburuhan untuk menghadapi kepentingan kapital dan negara (Ford, 2000; Hadiz, 1997; Kammen, 1997) setidaknya dapat dilihat sebagai alasan bagi optimisme ini. Vedi Hadiz (1997) bahkan secara spesifik melihat bahwa radikalisme pada periode ini adalah gejala bagi kebangkitan kembali gerakan kelas pekerja di bawah Orde Baru yang

¹ Staf Pengajar pada Universitas Sanata Dharma & Universitas Gajah Mada

ditandai dengan kemampuannya untuk mengusik stabilitas politik yang diciptakan rezim otoritarian di bawah Soeharto. Dengan tradisi radikal, ini serta sejumlah catatan tentang pengorganisasian, seharusnya, tidaklah berlebihan untuk melihat bahwa gerakan kelas pekerja akan terus bergulir layaknya bola salju seiring dengan merenggangnya represi politik – sekalipun tidak hilang sama sekali – pada tahun-tahun menjelang berakhirnya abad ke-20.

Destabilisasi kekuasaan Soeharto yang diakibatkan krisis moneter yang melanda sebagian Asia (Hill, 1998) memungkinkan komitmen Orde Baru terhadap kebijakan yang secara *de facto* hanya memungkinkan buruh direpresentasikan oleh satu kendaraan organisasional menemukan kerikil-kerikil penghambat (Ford, 2000). Rezim penguasa baru pasca-Soeharto akhirnya harus mengadopsi Konvensi ILO No.87 yang mengakui hak buruh untuk berorganisasi, sekalipun hal ini tidak lebih dari sebuah manuver politik untuk 'menciptakan kesan reformis' (Hadiz, 2001:122) dan demi memikat 'donor internasional' (Ford, 2000:5). Apa pun kontroversinya, keputusan ini menjadi tonggak penting bagi gerakan buruh Indonesia kontemporer. Michele Ford (2001:109-110), misalnya, mencatat kelahiran

dan revitalisasi sejumlah serikat pekerja yang beroperasi baik pada tingkat nasional maupun lokal dalam konteks Indonesia pasca-otoritarian. Setidaknya empat partai politik yang mengusung kata "buruh" atau "pekerja" (Leclerc, 1972; Ford, 2003: 187; Hadiz, 1997:53-4; 212-213) dapat mengikuti Pemilihan Umum 1999 sekalipun gagal dalam memperoleh suara secara signifikan, apalagi memenangkan kursi di parlemen (Ford, 2003). Di luar organisasi formal buruh seperti partai politik dan serikat pekerja, peluang pengorganisasian juga terbuka bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) perburuhan yang menurut Ford (2003:113) secara faktual 'mendominasi gerakan buruh' secara umum pada senjakala kekuasaan Orde Baru. Mereka ini melanjutkan partisipasi aktifnya pada periode pasca-Soeharto dengan menjadi inisiator bagi pembentukan organisasi-organisasi buruh formal pada berbagai tingkatan.

Himpitan ekonomi terhadap kelas pekerja industri manufaktur yang datang silih berganti sejak krisis politik pada 1997-1998 menciptakan pula momentum lain untuk melandasi optimisme akan kematangan serta soliditas gerakan buruh Indonesia. Berbagai persoalan klasik yang dialami buruh industri pada awal dan

pertengahan tahun 1990-an berkaitan dengan kondisi kerja dan marginalisasi tidak serta-merta menemukan jawabannya hingga permulaan abad ke-21. Tuntutan kenaikan upah buruh agar layak dengan kondisi ekonomi pada umumnya — termasuk di dalamnya tingkat inflasi, kesesuaian dengan indikator-indikator hidup yang memadai, dan kenaikan konstan harga bahan bakar minyak — merupakan motor penggerak yang tetap ada untuk menghidupkan gerakan buruh, seperti yang dijumpai pada dekade sebelumnya. Intensitas pemogokan industrial tetap tinggi hingga mendekati angka-angka menjelang krisis pada 1997 (terutama antara 1994-1996) dan media massa hampir tiada hentinya melaporkan aksi-aksi buruh di berbagai kantong industrial hingga hari ini.

Namun demikian, optimisme yang berangkat dari kondisi-kondisi objektif ini tidak dapat disangkal masih belum menjelma menjadi sebuah realitas seutuhnya seperti yang dibayangkan para aktivis dan akademisi yang berpihak pada perbaikan nasib buruh Indonesia. Bahkan Hadiz (1997) yang pernah menyemai apresiasi dan keyakinan akan gerakan buruh Indonesia di bawah rezim represif Soeharto dalam karya pentingnya tentang buruh

Indonesia dalam negara Orde Baru harus melihat kenyataan lain. Dalam artikelnya yang lain yang mencoba mengevaluasi gerakan buruh pasca-krisis dan pasca-reformasi, ia mengakui bahwa iklim perubahan politik kontemporer hanya memungkinkan 'proliferasi' serikat pekerja dan organisasi perburuhan ketimbang 'konsolidasi' dan 'unionisme yang efektif.' Dalam sebuah studi empiris di sebuah kawasan industrial di Kotamadya Tangerang, penulis menemukan bahwa kondisi-kondisi subyektif dalam gerakan buruh masih belum sepenuhnya siap mentransformasikan dirinya menjadi sebuah instrumen kelas pekerja yang solid (Warouw, 2004). Status pekerja dalam organisasi-organisasi perburuhan di tingkat lokal, apalagi nasional, yang masih bersifat perifer — sebatas pada hubungan dalam bentuk pemotongan gaji untuk iuran serikat pekerja di tempat kerja — menegaskan pernyataan Hadiz di atas tentang problema 'konsolidasi' dalam organisasi-organisasi kelas pekerja. Ini belum termasuk keluhan para buruh atas kegagalan serikat pekerja, yang kerap dibahasakan oleh pekerja sebagai "orang-orang dari Jakarta," untuk merepresentasikan aspirasi-aspirasi yang berkibar di tingkatan akar rumput.

Bagaimana kondisi empiris yang dialami buruh Indonesia pada hari-hari ini serta bagaimana realitas tersebut menciptakan pintu masuk bagi berkembangnya wacana *new social movement* akan dibahas penulis pada bagian berikut ini.

Sebuah Cerita dari Satu Kantong Industri

Suatu siang tahun 2001 di sebuah pabrik penghasil ban mobil, sepeda motor, dan sepeda di Tangerang. Hari itu adalah hari gajian. Arief (22 tahun, bukan nama sebenarnya) meninggalkan antrian panjang pekerja yang menunggu giliran menerima pembayaran atas kerja mereka sebulan. Dengan penat masih menggantung setelah bekerja sepanjang pagi, Arief nampak sumringah dengan upah bulanannya yang sebesar Rp 529,500. Saat yang sama, ia pun sadar bahwa jumlah itu hanyalah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-harinya di tengah kondisi ekonomi yang sulit pada masa itu. Namun, dalam perjalanan pulang ke kamar kontrakannya, benaknya terisi lebih dari sekadar kalkulasi matematis tentang bagaimana upahnya mencukupi pengeluarannya sehari-hari.

Sorenya, Arief terlihat mengungsi sebuah kotak kardus berisi sebuah pesawat televisi (teve) *anyar* yang baru dibelinya di

pasar dekat perkampungan buruh tempat ia tinggal. Segera setelah pesawat teve itu diset dan ditata di tengah kamar yang berukuran 3x3 meter, beberapa tetangga kamar di kompleks kontrakan itu datang untuk ikut menikmati perangkat baru milik Arief. Kualitas gambarnya tidaklah terlalu jernih, namun memadai bagi penontonnya yang duduk di atas lantai dingin hingga larut malam. Keesokan siang, Arief membawa sebatang bambu panjang ke kontrakannya untuk dipasangkan antena teve yang baru dibelinya selepas kerja *shift* siang di pabriknya. Setelah beberapa saat mengatur posisi antena, dengan dibantu seorang teman, Arief nampak puas dengan kualitas gambar pada teve barunya dan lega karena ia tidak perlu lagi mendatangi tetangga kontrakannya untuk menikmati hiburan segar dari saluran-saluran teve nasional.

Beberapa bulan ke depan, Arief kembali menambah pemilikan barang 'mewah'nya dengan sebuah pemutar CD/VCD, dua perangkat pengeras suara (*loudspeaker*), dan sebuah sepeda gunung. Kesemuanya dibeli dari uang hasil kerja kerasnya sebagai pekerja pabrik. Dan Arief hanyalah salah satu dari ratusan bahkan ribuan pekerja pabrik di perkampungan buruh itu dengan kepemilikan barang konsumtif yang senantiasa bertambah begitu tanggal muda tiba.

Ilustrasi di atas dikutip dari catatan lapangan penulis saat melakukan penelitian etnografis di kawasan yang dimaksud pada kurun 2000-2002. Menjamurnya insidensi kepemilikan barang konsumtif sebagai simbol modernitas dan kemajuan mungkin menggambarkan tahapan-tahapan akhir dari garis unilinear Rostowian mengenai perkembangan pembangunan ekonomi yang seolah menjadi keharusan bagi bangsa dunia berkembang sebagai syarat bagi kesejajarannya dengan bangsa yang telah terindustrialisasi (Todaro, 1982). Beberapa kata kunci dari paradigma tersebut adalah industrialisasi, *high consumption*, dan *leisure time*, nampak sesuai dengan impresi sepintas dari narasi di atas. Namun, sebuah realisasi penuh atas modernitas seperti diindikasikan dalam fase tinggal landas (*take-off*), atau bahkan pada tahap *high mass consumption*, mungkin juga hanya menjadi cermin obskura dari realitas keseharian di perkampungan-perkampungan pekerja industri di Tangerang. Adalah ironis bahwa pola konsumsi dan gaya hidup seperti ini menjadi keseharian mereka yang masih tinggal di kawasan yang air bersihnya masih menjadi persoalan sehari-hari dan tipikal kampung kumuh merupakan pengalaman keseharian. Lebih jauh, para pekerja industri masih harus bekerja keras

demis Rp.16.000,00 perhari (sesuai dengan pagu upah masa itu) atau lembur untuk bayaran lebih. Sebuah premis mengenai sedikit kerja untuk *leisure time* yang lebih jelas tidak berlaku di sini.

Identitas Modern dan Penegasan Diri Kelompok Marginal

Ilustrasi di atas mengekspresikan 'apa artinya menjadi manusia modern, menjadi orang kota, menjadi berbeda dari eksistensi kedesaan yang (dianggap) tidak modern,' sesuai dengan pandangan subjek-subjek lokal. Praktik budaya dan ekspresi seperti ini oleh Joel Kahn (2001:17) disebut sebagai 'modernisme,' yakni cara khusus untuk memahami modernitas. Di samping itu, oleh karena modernisme berkembang sesuai dengan ciri lokal, akan terdapat bentuk jamak modernisme.

Praktik modernisme di atas mengindikasikan upaya pekerja industri untuk menolak konsekuensi industrialisasi yang mengalienasi mereka. Problema alienasi yang disuarakan buruh dalam ekspresi ini tidak sepenuhnya dikaitkan dengan eksistensi mereka dalam hubungan produksi, seperti yang diisyaratkan Karl Marx (1977).

Bagi buruh migran di Tangerang, respons kreatif atas kehidupan modern baru akan nampak saat jagad (*universe*) mereka ditarik ke luar dinding pabrik, merambah wilayah-wilayah non-produksi. Dalam *setting* non-produksi inilah, modernisme tidak semata menjadi kritik terhadap industrialisasi, namun juga terhadap ketidakadilan (*inequality*) dalam masyarakat secara luas. Dalam ranah di luar pabrik inilah tercipta banyak arena modernitas yang menciptakan diskursus tempat kaum marginal menegaskan dan mendefinisikan sendiri dirinya, bebas dari pengaruh kekuatan-kekuatan dominan.

Konsumsi komoditas yang dikaitkan dengan gaya hidup (modern) menjadi ekspresi kelas yang menantang stigma kemiskinan dan ketidakberdayaan buruh industri. Dengan demikian, kualitas kehidupan material yang dialami pekerja industri saat ini mengindikasikan usaha subaltern untuk menempatkan dirinya kurang lebih sejajar dengan kelas-kelas sosial perkotaan lainnya yang menikmati buah pembangunan. Konsumsi juga menjadi ranah tempat kaum marginal mencari jalan keluar dari tekanan dan pengalaman traumatis di lantai produksi. Modernisme seperti dipahami para pekerja ini menjadi realitas keseharian perkotaan di mana

mereka dapat mengklaim pengambilalihan (*appropriation*) gaya hidup modern dan modernitas perkotaan. Tidak jadi masalah lama jam kerja dan keringat adalah harganya. Konsumerisme pada mereka menjadi representasi penolakan atas persepsi umum masyarakat bahwa menjadi 'buruh pabrik' identik dengan kemiskinan dan kepapaan.

New Social Movement: Sebuah Ringkasan

New Social Movement (NSM) sesungguhnya merupakan sebuah bentuk pemaknaan baru atas aksi kolektif dengan mencoba memperhatikan aspek sosiokultural lebih daripada faktor sosiopolitis dalam gerakan sosial (Touraine, 1985:780). NSM sebagai bentuk aksi kolektif (*collective action*) maupun sebagai suatu bangunan teori sebenarnya merupakan gejala yang sangat khas dalam masyarakat industrial di kawasan Eropa Barat dan Amerika Utara. Hal ini ditandai dengan kemunculan gerakan-gerakan sosial berskala luas pada dekade 1960-an dan 1970-an yang merespons gejala menguatnya negara, yang bersamaan dengan ekspansi pasar, menjadi dua kekuatan dominan dalam melakukan penetrasi ke dalam berbagai aspek kehidupan

warga negara. Kemampuan negara dan pasar untuk mengatur secara sistematis ini menjadikan masyarakat sipil (*civil society*) kehilangan ruang sosialnya.

Gerakan sosial, dalam perspektif NSM, merupakan perjuangan dalam merebut kendali atas produksi makna — bukan barang — dan pembentukan identitas-identitas kolektif baru yang diorganisasikan kembali dalam sebuah masyarakat sipil pasca-industrial. NSM, baik sebagai teori maupun praktik aksi, berangkat dari keyakinan bahwa baik kekuasaan dan resistensi tersebar di mana-mana dan, karenanya, terdesentralisasi. Berbeda dengan gerakan sosial sebelumnya, yang dapat disebut sebagai *old social movement*, seperti banyak dijumpai pada gerakan buruh, NSM tidak membatasi dirinya pada pencapaian material dan perjuangan redistributif secara ekonomis. Dengan demikian, isu mengenai peningkatan upah buruh, ketidakadilan ekonomi, dan eksploitasi kelas menjadi sekunder. Lebih jauh, NSM tidak melibatkan dirinya dalam pergulatan ideologis seputar persoalan anti-kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas (Singh, 2001:96). Oleh sebab itu, gagasan mengenai revolusi dan perjuangan revolusioner demi penggu-

lingan kekuasaan negara bukan menjadi perhatian utamanya.

Realitas pasca-industrial di mana diferensiasi sosial menjadi sedemikian kompleks telah membuat identitas sosial tidak lagi dapat dilihat sebagai hasil atau konsekuensi logis dari relasi produksi dan refleksi mekanis dari kepentingan ekonomi. Itulah sebabnya Alain Touraine (1985: 777) menyebut bahwa NSM seharusnya dilihat dalam kaitannya dengan konsepsi tentang bentuk representasi baru dalam masyarakat yang ditandai dengan keberagaman. Dalam kerangka ini maka konflik dan gerakan sosial tidak dapat lagi dipahami semata dalam perspektif kelas yang ditentukan oleh kondisi ekonomi. Secara tradisional, aksi-aksi kolektif dalam pusaran NSM dikaitkan dengan isu, di antaranya, ekologi, feminisme, perdamaian, regionalisme, dan identitas etnis yang secara umum lebih berorientasi pada nilai-nilai humanis, kultural, dan non-materialistis (Inglehart, 1971; Abramson dan Inglehart, 1986). Tidaklah mengherankan bahwa dalam beberapa hal, NSM terinspirasi oleh nilai dan kebudayaan tradisional. Bahkan ada pula yang menyebutnya sebagai “tradisionalisme kritis” (Nandy, 1987). Menguatnya wacana-wacana anti-sistemik ini mengindikasikan

sinyalemen Alain Touraine (1984) bahwa dalam masyarakat pasca-industrial terdapat kecenderungan pemisahan antara struktur sosial — termasuk pula ekonomi dan politik — dan budaya. Hubungan antara struktur, terutama ekonomi, dengan bidang-bidang kehidupan lainnya tidak lagi semata merupakan hubungan antara bangunan bawah dan bangunan atas dalam konsepsi Marxian. Ini sekaligus mentransendensikan dimensi kelas dan membongkar selubung kondisi-kondisi material dan ekonomi dalam mobilisasi-mobilisasi NSM pada tingkatan akar-rumput. Para aktor dalam aksi-aksi kolektif menegaskan keterlibatan mereka di dalam gerakan sebagai manusia secara utuh dan bukan lagi sebagai pihak yang diasosiasikan semata pada aktivitas ekonomi dan kerja produksi (Singh, 2001:114). NSM merupakan gerakan sosial yang aspek kualitasnya menjadi lebih dominan daripada faktor kuantitas (Habermas, 1981; Offe, 1985). Dengan demikian, alih-alih mencerminkan kepentingan satu kelas tertentu seperti dalam gerakan-gerakan sosial sebelumnya, NSM sebagai praktik aktivisme ditujukan lebih untuk membela nilai-nilai dasar kemanusiaan serta perjuangan bagi kondisi-kondisi kehidupan yang lebih baik (Singh, 2001:96).

Secara konseptual NSM menolak preposisi Marxis mengenai keutamaan sistem produksi dan perjuangan berbasis kelas sebagai motor perubahan sosial. Berangkat dari asumsi mengenai kegagalan Marxisme dalam merealisasikan pembebasan dan emansipasi, teori NSM melihat dua kecenderungan reduksionis dari Marxisme sebagai penyebabnya (Laclau dan Mouffe, 1985:76). Pertama adalah reduksionisme ekonomi yang beranggapan bahwa sebuah formasi sosial beserta proses politis dan ideologisnya merupakan turunan (hanya) dari logika ekonomi. Kedua adalah reduksionisme kelas yang meyakini bahwa identitas para agen sosial ada terutama karena posisi kelas mereka sehingga aktor-aktor sosial secara fundamental adalah aktor kelas dan identitas mereka merupakan cerminan dari kepentingan kelas (Poulantzas, 1973:27; Wright, 1979:61). Dengan demikian, semua bentuk perjuangan merupakan perjuangan berbasiskan kelas dan segala bentuk pengelompokan manusia adalah pengelompokan berdasarkan kelas. Permasalahannya adalah bahwa berbagai gerakan sosial kontemporer yang berkaitan dengan isu anti-rasisme, perlucutan senjata, diskriminasi gender, lingkungan, dan hak asasi manusia berada di luar paradigma kelas dan mengabaikan konsepsi

materialistik dan determinisme ekonomi Marxian. Hal ini sekaligus memberikan penegasan tentang runtuhnya paradigma kelas sebagai model eksplanatoris dalam gerakan sosial.

Oleh karena identitas aktor dalam aksi kolektif tidak lagi terbentuk berdasarkan latar belakang kelas, NSM secara umum mengabaikan model pengorganisasian serikat buruh oleh pekerja industri maupun model partai politik dalam sistem demokrasi representatif, yang oleh NSM dianggap konvensional (Gorz, 1982). Kedua model ini merupakan pengejawantahan yang khas dari representasi modernis yang menganggap bahwa masyarakat kontemporer — yang modern dan industrial — merupakan hasil dari representasi kapitalisme, industrialisme, dan dominasi peradaban Barat. Alternatif terhadap kedua model 'usang' ini adalah politik dan aksi pada tingkatan akar rumput dengan melibatkan kelompok-kelompok kecil yang terfokus pada isu-isu lokal. Atas kesadaran untuk menghindari bentuk-bentuk representasi pada tingkatan makro dan elite inilah, NSM mengarahkan ranah sosialnya pada masyarakat sipil (*civil society*) dengan mengangkat persoalan-persoalan mengenai 'demoralisasi struktur kehidupan keseharian' (Cohen, 1985:667). Kemerosotan ini

menjadi manifes sejalan dengan menguatnya kemampuan negara bersama dengan ekspansi pasar untuk mengatur kehidupan warganya. Pada tataran ini masyarakat kehilangan otonominya berhadapan dengan kekuatan negara dan pasar. Dalam kerentanan inilah maka NSM mengangkat isu mengenai 'pembelaan diri' (*self-defense*) (Singh, 2001:99) masyarakat terhadap kontrol sosial yang dilakukan keduanya. Menguatnya kekuasaan negara dan pasar telah menggerogoti otonomi dan kebebasan manusia untuk mengontrol dirinya, memiliki tubuhnya sendiri, dan menafsirkan sendiri apa yang baik bagi diri dan masyarakatnya sendiri. Gejala ini oleh Jurgen Habermas (1981:35) disebut sebagai '*colonization of life-world*', di mana kehidupan privat manusia telah menjadi objek bagi kontrol negara dan modal.

Kesadaran terhadap kemerosotan ini kemudian menjadi pijakan bagi para aktor lintas-kelas dalam gerakan sosial ini untuk memperjuangkan otonomi, keragaman, serta hak untuk memiliki corak eksistensi yang berbeda (Cohen, 1985:669; Frank dan Fuentes, 1987:155-6). NSM, oleh karenanya, menjadi sebuah inisiatif masyarakat dan individu untuk memulihkan kembali otoritas atas dirinya yang sebelumnya telah sedemikian

dipengaruhi oleh pilihan-pilihan yang dibuat oleh sistem (Habermas, 1981). Perjuangan pada tingkatan akar rumput termasuk pula inisiatif untuk menempatkan masyarakat (*society*) sejajar dengan negara dan ekonomi. Dimasukkannya masyarakat dalam relasi-relasi ini memungkinkan terciptanya 'ruang publik (*public space*)' (Habermas, 1981, 1989) di mana baik individu maupun kelompok menegaskan otonomi dan kebebasannya dalam merepresentasikan dirinya dalam berhadapan dengan negara dan pasar.

Penegasan *agency*, yang di dalamnya mencakup individu maupun masyarakat, dapat dilihat bukan saja dengan mengaktifkan tradisi dan kearifan lokal, namun juga melalui aksi-aksi yang terlokalisasi pada topografi yang khusus (Giri, 1992: 41). Dalam banyak hal, aksi-aksi yang dilakukan dalam tingkatan ini tidak secara langsung menghujamkan kritiknya pada struktur-struktur yang memungkinkan terjadinya marginalisasi. Sebaliknya, perlawanan dilakukan terhadap berbagai dampak langsung yang diakibatkan oleh beroperasinya struktur-struktur yang mengabaikan para agen lokal dan masyarakat sipil. Itulah sebabnya gerakan-gerakan ini cenderung menempatkan kehidupan sehari-hari (*every-*

day life) sebagai medan perlawanan di mana pada kesehariannya manusia diasumsikan senantiasa terlibat di dalam politik mikro di luar kerangka negara dan sistem (Walker, 1988: 141; Scott, 1990). Politik dalam kehidupan sehari-hari merupakan pengejawantahan konsepsi tentang "politik yang hidup" yang menjadi sebuah "pandangan hidup" (*way of life*) (Bailey, 1988). Bentuk ini sekaligus membedakannya dari politik formal dalam masyarakat modern yang cenderung mengabaikan partisipasi dan emansipasi semua pihak di dalam instrumen-instrumen politik seperti yang banyak dijumpai dalam sistem demokrasi perwakilan.

Tidak ada satu bentuk gerakan pun yang dapat secara eksklusif dikaitkan dengan NSM. Sebaliknya, ia memiliki 'bentuk yang beragam' (*polymorphous expressions*) (Singh, 2001:96) dan di dalamnya terkandung semangat untuk menolak penyeragaman, homogenisasi, dan penyamarataan di bawah kekuasaan ideologi global maupun sistem kekuasaan tertentu. Itulah sebabnya gerakan antirasisme, antinuklir, perlucutan senjata, feminisme, maupun aksi-aksi kolektif berbasis isu lingkungan, etnisitas, kebebasan sipil, hingga pada pembelaan atas gaya hidup (*life style*) dan kontrol atas tubuh memberikan

warna pada NSM. Keragaman bentuk ini menjelaskan bahwa identitas dalam masyarakat modern tidak semata bergantung pada posisi kelas. Sosialitas manusia bersifat heterogen dan, sebagai akibatnya, bentuk-bentuk aksi sosial pun memiliki arah, tujuan, dan kepentingan yang berbeda.

New Social Movement: Sebuah Akhir bagi Politik Kelas Pekerja?

Terpaparnya pekerja industri terhadap berbagai praktik, ekspresi, dan ranah, khususnya seperti yang penulis temukan, menjelaskan bahwa identitas mereka bukan merupakan sesuatu yang bersifat *ajeg* dan tak dapat diganggu gugat. Identitas itu sendiri bukan sesuatu yang sudah jadi (*fixed*) atau sudah ada sebelumnya (*predetermined*). Identitas-identitas pekerja industri tidak terbangun semata oleh kondisi-kondisi yang konstan (misalnya: produksi industrial menghasilkan identitas buruh, tradisi dan sejarah menciptakan identitas kedesaan yang homogen), tanpa peduli pada kondisi-kondisi kontemporer. Konstruksi identitas pekerja industri merupakan proses yang belum dan tidak akan pernah selesai. Ia secara konstan mengalami transformasi dan perubahan secara dina-

mis. Proses pencarian format identitas budaya mereka justru dipertajam oleh interaksi dengan diskursus global dan dunia yang senantiasa berubah. Hal ini, di antaranya, dimungkinkan oleh apa yang disebut Appadurai (1990:7-9) dengan *ethnoscape* (mobilitas fisik yang memberikan mereka realitas dan ruang yang senantiasa bergeser) dan *mediascape* (kemelekhurufan yang semakin meningkat dan paparan pada media), yang menghasilkan citra yang beragam yang menjadi dasar bagi pembentukan eksistensi masa kini dan mendatang. Dinamika-dinamika yang ada ini menunjukkan bahwa realitas buruh tidak *melulu* tentang pabrik. Ada desa tempat imajinasi tentang migrasi, modernitas, dan pekerjaan di kota dimulai. Desa itu sendiri tidak secara eksklusif berarti tradisi dan konservatisme, terutama karena desa telah menjadi modern melalui pembangunan dan modernisasi pedesaan. Di sini pendidikan modern (yang tersentralisasi) dan media massa memiliki peran dalam produksi imajinasi mengenai kehidupan (*imagined lives*). Di kota, perkampungan buruh sama pentingnya sebagai ranah tempat internalisasi sebagai individu modern, dengan merengkuh gaya hidup perkotaan dan praktik-praktik lainnya yang dianggap 'modern,' diekspresikan. Dalam ranah

yang sama para buruh juga berhadapan dengan pengalaman multi-etnis dan multikultural, yang bersama dengannya buruh terlebur dalam aspirasi dan gagasan yang terkonvergensi mengenai *imagined community*. Masih ada lagi ranah-
ranah yang tercipta melalui citra, di mana mereka tidak pernah menjadi bagian darinya, namun dalam khayalan mereka menjadi bagian darinya, dan hal ini menentukan bagaimana mereka akan membayangkan dan mengkonstruksikan masa depannya.

Dengan melihat ekspektasi kaum buruh industri perkotaan terhadap modernitas dan bentuk-bentuk modernisme, seperti yang dikemukakan pada ilustrasi di depan tentang gaya hidup dan imajinasi sosial yang berorientasi pada kelas menengah, nampak bahwa eksistensi kelas pekerja tidak dapat lagi semata didukung oleh preposisi mengenai perjuangan dan antagonisme kelas. Jacquelyn Southern (2000:222), dalam konteks masyarakat pasca-industrial, berpendapat bahwa faktor-faktor seperti 'kemakmuran, konsumerisme, dan produktivisme' telah menciptakan kondisi di mana para pekerja kasar/manual (*blue-collar worker*), meninggalkan 'kondisi proletarian' dan 'kepemimpinan mo-

ral' mereka dalam perjuangan kelas melawan kelas-kelas antagonis mereka. Di sini imajinasi modern menjadi penting dalam mentransendensikan eksistensi kekinian kaum pekerja ke dalam wilayah-wilayah imajiner, yang secara tipikal didefinisikan sebagai realitas kelas-non-pekerja. Dengan demikian, konflik-konflik yang melingkari kaum pekerja industri kontemporer telah bergeser dari isu-isu ketertindasan ke isu-isu yang lebih khas dimiliki oleh masyarakat modern dengan gejala-gejala pasca-industrialnya.

Dunia kini diwarnai oleh peran baru imajinasi dalam kehidupan sosial' (Appadurai, 1990:4). Imajinasi menjadi sebuah tolok ukur bagi seseorang untuk melihat tempatnya di tengah aktualitas kekinian, sama dengan saat Benedict Anderson (1983) melihat perjuangan kaum pribumi melawan penguasa kolonial dengan merealisasikan '*imagined communities*,' yang menyejajarkan mereka dengan bangsa-bangsa berdaulat lainnya. Praktik-praktik untuk menjadikan modernitas sebagai bagian dari kesadaran subjektif pekerja industri perkotaan merupakan upaya untuk menegaskan bahwa modernisme bukan merupakan 'proses yang terpisah' (Kahn, 2001:20) dari dinamika-dinamika yang terjadi di tempat-

tempat lain. Jadi, eksistensi 'kelas pekerja' di Tangerang merupakan 'sebuah kesadaran relasional' (Appadurai, 1996:186) dengan eksistensi lain di luar realitas para pekerja industri perkotaan. Pengalaman kelas dan marginalitas perkotaan, sebagai akibat dari subordinasi mereka dalam hubungan industrial dan status sosio-ekonomi mereka, merupakan ancaman bagi upaya mengejar identitas modern, sebuah hambatan bagi terealisasinya imajinasi modernitas menjadi realitas sosial. Oleh karena itu, modernisme sebagai praktik untuk mentransformasikan imajinasi menjadi pengalaman aktual serta merupakan perjuangan sebuah kelas melawan proses pengabaian mereka dari modernitas demi memperoleh pengakuan modern (*modern recognition*), yang menempatkan mereka sejajar dengan warga negara lainnya yang diuntungkan dari proses pembangunan. Pengambilalihan simbol-simbol perkotaan oleh para pekerja pabrik ini menggarisbawahi 'kesadaran subaltern' (Spivak, 1999:24-8) terhadap pengabaian mereka dari arus global yang besar yang secara kreatif dibalik menjadi sebuah keadaan tempat inklusivitas mereka alamnya memperoleh pengakuan.

Namun demikian, modernitas tidak serta-merta menjadikan politik kelas pekerja — yang secara tipikal berpusat di sekitar aktivisme buruh — tidak lagi relevan. Angka pemogokan buruh dan aksi-aksi kolektif dalam dunia industri tetaplah tinggi. Kebijakan-kebijakan pemerintah akhir-akhir ini yang tidak berpihak pada masyarakat luas, terutama dengan dicabutnya subsidi anggaran atas bahan bakar minyak (BBM), menjamin bahwa penolakan-penolakan pada tingkatan akar-rumput akan senantiasa berlanjut, bahkan berkembang. Media massa pun tidak berhenti melaporkan tentang aksi-aksi buruh di kantong-kantong industri. Isu-isu klasik mengenai kondisi kerja yang buruk dan marginalisasi industrial masih tetap hadir hingga hari ini. Namun, kondisi-kondisi subjektif dalam gerakan buruh mengungkapkan bahwa ia belumlah siap untuk mentransformasikan dirinya menjadi instrumen kelas pekerja yang solid. Apa yang terjadi dengan pengalaman empiris yang penulis temukan menunjukkan bahwa politik kelas pekerja tidak lagi dapat bersandar pada premis-premis mengenai ketidakberdayaan buruh dan penaklukan total mereka dalam menghadapi kekuatan-kekuatan dominan (negara dan pengusaha). Kondisi-kondisi objektif, misalnya: upah nominal yang

meningkat, semakin murahya barang-barang konsumtif, pendidikan yang lebih baik, dan paparan terhadap media, mengindikasikan bahwa pekerja industri di permulaan abad ke-21 ini memiliki arena permainan dan aspirasi yang berbeda dengan yang dialami kaum buruh industri dari era-era sebelumnya. Kondisi-kondisi ini memberikan mereka serangkaian kemungkinan untuk mengusung aspirasinya dalam arena-arena yang berbeda (bukan lagi pabrik-pabrik dan hubungan-hubungan buruh-kapital), tanpa menghilangkan kapabilitas kritis mereka untuk mengkritisi ketidakadilan dan *inequality* dalam masyarakat.

Penutup

Dalam artikel ini penulis tidak berpretensi untuk membuat klaim bahwa dinamika politik perburuhan pada tingkatan akar-rumput merefleksikan gejala terbuka dari NSM. Tentu saja ada persoalan konseptual untuk mengkategorikan gerakan buruh ke dalam wacana ini mengingat dunia kerja dan premis-premis klasik yang mendasari keberadaan pekerja industri merupakan representasi dari masyarakat industrial. Hal ini menjadi sedikit lebih rumit karena pada umumnya karakteristik gerakan

buruh mewakili kecenderungan dalam gerakan sosial lama (*old social movement*) yang berkaitan dengan institusi-institusi politik formal dalam sistem demokrasi perwakilan.

Namun demikian, bukan berarti realitas dan eksistensi pekerja industri Indonesia tidak memiliki kaitan dalam bentuk apa pun dengan premis-premis pembentuk NSM. Ilustrasi penulis tentang merebaknya konsumerisme di kalangan pekerja mungkin dapat dipakai sebagai rantai penghubung. Tidak tertutup kemungkinan bahwa sementara pihak memandangnya semata sebagai suatu bentuk kesadaran palsu (*false consciousness*). Namun, gejala yang sama dapat pula dilihat sebagai bagian dari upaya manusia-manusia marginal seperti buruh untuk mengklaim kembali otonomi atas diri mereka sendiri dalam ranah non-produksi. Dengan memahami bahwa eksistensi pekerja industri bukan semata lingkungan pabrik dan kerja, maka akan ditemukan berbagai kemungkinan *life-world* seperti yang dimaksudkan oleh Habermas. Kondisi-kondisi marginalisasi dan dominasi yang dihasilkan oleh relasi produksi tidak selalu harus direspons dengan perlawanan dan kritisisme seperti yang ditemukan dalam gerakan maupun organisasi perburuhan (tradisional) pada umum-

nya. Sebaliknya, eksklusi struktural seperti ini dapat pula diterjemahkan menjadi diskursus-diskursus kultural di luar lantai pabrik tempat para buruh membuka ruang untuk menemukan kembali martabat dan otonominya sebagai manusia secara penuh.

Justru dengan penemuan ruang ekspresi dan eksistensi yang semakin luas itulah sesungguhnya gerakan buruh tidak akan pernah kehabisan sumber inspirasi perjuangannya. Seandainya semua tuntutan ekonomi dan isu tentang kondisi kerja telah terpenuhi, pertanyaan tentang ke mana gerakan buruh setelah itu mungkin akan menjadi persoalan besar. NSM memberikan alternatif tentang bagaimana kritisisme terha-

dap negara dan pasar dapat terus dipelihara. Apa yang penulis coba tunjukkan adalah bahwa isu non-materialisme adalah mungkin dalam realitas buruh industri di Indonesia, setidaknya di Tangerang. Adalah benar bahwa gambaran-gambaran kecil pada tingkatan akar rumput ini masih jauh, sangat jauh, dari sebuah gerakan kritis secara kolektif. Klaim terhadap ruang publik dalam usaha untuk menempatkan masyarakat dan individu sejajar dengan negara dan pasar seperti kebanyakan NSM masih jauh dari perhatian para pekerja. Tentu saja akan menarik mengamati apa yang menurut penulis merupakan gejala prematur sebuah gerakan berbasis identitas dalam gerakan buruh mengalami transformasi menjadi NSM.

Daftar Rujukan

- Abramson, Paul dan Ronald Inglehart. 1986. "Generational Replacement and Value Change in Six Western Societies". *American Journal of Political Science* 31(1):1-25.
- Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Appadurai, Arjun. 1990. "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy." *Public Culture* 2(2):1-24.
- Appadurai, Arjun. 1996. *Modernity at Large*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Cohen, Jean. 1985. "Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements." *Social Research* 52(4): 663-716.
- Ford, Michele. 2000. "Research Note: Indonesian Trade Union Developments since the Fall of Suharto." *Labour and Management in Development Journal* 1(3):1-10.
- Ford, Michele. 2001. "Challenging the Criteria of Significance: Lessons from Contemporary Indonesian Labour History." *Australian Journal of Politics and History* 47(1):100-113.
- Ford, Michele. 2003. *NGO as Outside Intellectual: A History of Non-Governmental Organisations' Role in the Indonesian Labour Movement*. Disertasi PhD, tidak diterbitkan. Wollongong: University of Wollongong.
- Frank, Andre Gunder dan Marta Fuentes. 1987. "Nine Theses on Social Movements." *Thesis Eleven* 18/19: 143-65.
- Giri, Ananta. 1992. "Understanding Contemporary Social Movements." *Dialectical Anthropology* 17:1: 35-49.
- Gorz, Andre. 1982. *Farewell to the Working Class: An Essay on Post-Industrial Socialism*. London: Pluto Press.
- Habermas, Jurgen. 1981. "Social Movements". *Telos* No.19.
- Habermas, Jurgen. 1989. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into A Category of Bourgeois Society*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hadiz, Vedi R. 1997. *Workers and the State in New Order Indonesia*. London: Routledge.
- Hadiz, Vedi R. 2001. "New Organising Vehicles in Indonesia: Origins and Prospects", dalam Jane Hutchison dan Andrew Brown (eds.). *Organising Labour in Globalising Asia*. London: Routledge. Hal 108-126.

- Hill, Hal. 1998. "The Indonesian Economy: The Strange and Sudden Death of A Tiger", dalam Geoff Forrester dan R.J May (eds.). *The Fall of Soeharto*. Bathurst: Crawford House Publishing. Hal 93-103.
- Inglehart, Ronald. 1971. "The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-Industrial Societies." *The American Political Science Review* 64(4):991-1017.
- Kahn, Joel. 2001. *Modernity and Exclusion*. London: Sage Publications.
- Kammen, Douglas Anton. 1997. *A Time To Strike: Industrial Strikes and Changing Class Relations in New Order Indonesia*. Disertasi PhD tidak diterbitkan. Ithaca: Cornell University.
- Laclau, Ernesto dan Chantall Mouffe. 1985. *Hegemony and Socialist Strategy*. London: Verso.
- Leclerc, Jacques. 1972. "An Ideological Problem of Indonesian Trade Unionism in the Sixties: Karyawan versus Buruh". *Review of Indonesian and Malayan Affairs (RIMA)* 6(1):76-91.
- Marx, Karl. 1977. "The German Ideology", dalam David McLellan (ed.). *Karl Marx: Selected Writing*. London: Oxford University Press. Hal 159-91.
- Nandy, Ashis. 1987. "Cultural Fraes for Social Transformation: A Credo." *Alternatives* 13(1): 113-123.
- Offe, Claus. 1985. "New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics". *Social Research* 52(4): 817-68.
- Poulantzas, Nicos. 1973. "On Social Classes". *New Left Review* 78 (March-April): 27-54.
- Scott, James. 1990. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven: Yale University Press.

- Singh, Rajendra. 2001. *Social Movements, Old and New: A Post-modernist Critique*. New Delhi: Sage Publications.
- Southern, Jacquelyn. 2000. "Blue Collar, White Collar: Deconstructing Classification" dalam J.K Gibson-Graham, Stephen Resnik, dan Richard D. Wolff (eds.). *Class and Its Others*. Minneapolis: University of Minnesota Press. Hal 191-224.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. 1995. "Can the Subaltern Speak", dalam B. Ashcroft, G. Griffiths, H Tiffin (eds.). *The Post-Colonial Studies Reader*. London: Routledge. Hal 24-28.
- Todaro, Michael. 1982. *Economics for a Developing World: An Introduction to Principles, Problems and Policies for Development*. Barlow: Longman.
- Touraine, Alain. 1984. *The Return of the Actor*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Touraine, Alain. 1985. "An Introduction to the Study of Social Movements". *Social Research* 52(4): 749-787.
- Walker, R.B. 1988. *One World, Many Worlds: Struggles for a Just World Peace*. London: Zed Books.
- Warouw, J. Nicolaas. 2004. *Assuming Modernity: Migrant Industrial Workers in Tangerang, Indonesia*. Disertasi PhD tidak diterbitkan. Canberra: The Australian National University.
- Wright, Erik Olin. 1979. *Class, Crisis and the State*. London: Verso.